

MANAJEMEN PENJAMINAN MUTU UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

¹Hanafiah, ²Teti Ratnawulan, ³Susilo Wardoyo

^{1,2,3} Universitas Islam Nusantara, Indonesia

[¹hanafiah@uninus.ac.id](mailto:hanafiah@uninus.ac.id)

[²teti.ratnaw@gmail.com](mailto:teti.ratnaw@gmail.com)

[³susilowardoyo2017@gmail.com](mailto:susilowardoyo2017@gmail.com)

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) at the Republic of Indonesia Defense University (Unhan), focusing on the planning, implementation, evaluation, and follow-up actions carried out by the university to improve the quality of education. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of SPMI at Unhan and to identify the challenges encountered at each stage. The research method employed is a qualitative approach, using interviews, observation, and documentation as data collection techniques.

The results of the study show that although Unhan has demonstrated a strong commitment to planning and implementing the SPMI, several obstacles remain, such as limited resources, lack of stakeholder involvement, and challenges in developing a competency-based curriculum and teaching. Evaluation and follow-up actions were also found to be less effective, as they tended to focus more on administrative aspects rather than academic development. Therefore, this study suggests that the university improve stakeholder engagement, enhance resource management, and optimize outcome-based evaluation and follow-up actions to sustainably improve the quality of education.

Keywords: *Internal Quality Assurance System (SPMI), Defense University, Education Quality.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pertahanan RI (Unhan), dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut yang dilakukan oleh universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas SPMI di Unhan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam setiap tahapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Unhan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam perencanaan dan pelaksanaan SPMI, terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya keterlibatan stakeholder, serta tantangan dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran berbasis kompetensi. Evaluasi dan tindak lanjut juga ditemukan kurang

efektif karena lebih banyak berfokus pada aspek administratif daripada pengembangan akademik. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar universitas memperbaiki keterlibatan stakeholder, meningkatkan pengelolaan sumber daya, serta mengoptimalkan evaluasi dan tindak lanjut berbasis hasil untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Universitas Pertahanan, Kualitas Pendidikan.

A. Pendahuluan

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menjamin bahwa proses dan hasil pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Menurut Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, penjaminan mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem ini mencakup penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara internal oleh perguruan tinggi (Sistem Penjaminan Mutu Internal/SPMI), serta secara eksternal melalui akreditasi (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal/SPME). Dalam pandangan Zulkarnain (2021), manajemen penjaminan mutu di pendidikan tinggi bukan sekadar instrumen administratif, tetapi

merupakan kerangka strategis untuk memastikan relevansi dan keunggulan akademik. Implementasi penjaminan mutu yang efektif menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif terhadap tuntutan zaman, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan pentingnya mutu sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu tidak dapat dilepaskan dari siklus perbaikan berkelanjutan yang dikenal dengan pendekatan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Model ini diperkenalkan oleh W. Edwards Deming sebagai fondasi dalam manajemen mutu modern, yang kemudian diadaptasi secara luas di berbagai sektor termasuk pendidikan tinggi. Langkah pertama, *Plan*, merujuk pada proses perencanaan untuk menetapkan standar mutu dan tujuan peningkatan

kualitas. Tahap kedua, *Do*, adalah pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. Langkah ketiga, *Check*, melibatkan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Terakhir, *Act*, adalah pengambilan tindakan korektif dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya. Deming (1986) menegaskan bahwa “*improvement of quality must be based on a structured and ongoing process of feedback and refinement,*” yang berarti peningkatan mutu harus bersifat sistematis dan siklik. Dengan penerapan siklus PDCA secara konsisten, institusi pendidikan tinggi dapat memastikan bahwa setiap proses akademik dan non-akademik berjalan sesuai standar mutu dan terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zaman.

Langkah-langkah penjaminan mutu berbasis siklus PDCA tidak sekadar bersifat administratif, melainkan secara strategis ditujukan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai luaran utama pendidikan tinggi. Kompetensi mahasiswa mencerminkan integrasi dari pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap

(*attitudes*) yang harus dimiliki lulusan agar mampu berkontribusi secara profesional dan sosial dalam masyarakat. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kompetensi lulusan dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum maupun khusus yang dirancang sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Secara teoritis, konsep kompetensi ini selaras dengan pandangan Spencer dan Spencer (1993) yang mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar seseorang yang berhubungan secara kausal dengan kinerja unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu yang dirancang dan dijalankan secara efektif menjadi sarana untuk memastikan bahwa seluruh proses Pendidikan mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi berorientasi pada pembentukan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara utuh.

Meskipun kerangka sistem penjaminan mutu telah diatur secara normatif melalui berbagai regulasi

nasional, implementasinya di banyak perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu indikatornya adalah masih terdapat sejumlah perguruan tinggi yang belum memperoleh akreditasi yang layak, atau bahkan belum terakreditasi sama sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjaminan mutu di tingkat institusi belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengelolaan akademik dan non-akademik. Menurut Forum Human Capital Indonesia (2022), ketidakterpenuhinya standar mutu di banyak perguruan tinggi turut berkontribusi pada rendahnya kualitas lulusan. Hal ini diperparah dengan realitas bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi masih belum siap memasuki dunia kerja, yang tercermin dari meningkatnya angka pengangguran terdidik setiap tahunnya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari lulusan perguruan tinggi cenderung lebih tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kompetensi

lulusan belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, kesenjangan antara tujuan ideal penjaminan mutu dan realitas di lapangan menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi melalui sistem manajemen mutu yang lebih terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan.

Hasil studi awal di beberapa perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem penjaminan mutu masih jauh dari kata optimal. Permasalahan teridentifikasi pada setiap tahap manajemen mutu, mulai dari perencanaan yang belum berbasis data kebutuhan lulusan, pelaksanaan program mutu yang bersifat administratif semata, hingga evaluasi dan tindak lanjut yang belum dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis. Lemahnya pengendalian mutu pada tahapan-tahapan tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini tercermin dalam tingginya masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama, serta masih banyaknya sarjana yang belum terserap oleh dunia industri. Studi Forum Human Capital Indonesia

(2022) juga menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara capaian pembelajaran lulusan dan kebutuhan kerja menjadi penyebab utama meningkatnya pengangguran terdidik, khususnya di daerah-daerah padat pendidikan seperti Jawa Barat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya revitalisasi sistem penjaminan mutu secara menyeluruh agar perguruan tinggi tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap kerja.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali fenomena sistem penjaminan mutu di Universitas Pertahanan RI secara mendalam, terutama dalam konteks peningkatan kompetensi mahasiswa. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2014), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai kebijakan dan praktik penjaminan mutu yang diterapkan di perguruan tinggi. Penelitian ini dirancang untuk

memahami bagaimana manajemen penjaminan mutu internal (SPMI) diterapkan dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa di universitas tersebut.

Metode penelitian ini berbentuk studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci penerapan sistem penjaminan mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut di Universitas Pertahanan RI. Yin (2018) mengungkapkan bahwa studi kasus adalah pendekatan yang tepat untuk memahami fenomena dalam konteks tertentu, karena memberi kesempatan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang dinamika yang terjadi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, sesuai dengan karakteristik pendekatan kualitatif. Teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dari berbagai perspektif yang berbeda.

1. Observasi: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan di Universitas Pertahanan RI.

Observasi ini mencakup pengamatan terhadap implementasi kebijakan penjaminan mutu dalam proses pembelajaran dan pengelolaan kurikulum. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mencatat praktik-praktik yang tidak selalu tercatat dalam dokumen atau wawancara, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas di lapangan.

2. Wawancara: Wawancara dilakukan dengan berbagai informan kunci yang terkait dengan implementasi sistem penjaminan mutu di universitas, termasuk pimpinan universitas, unit penjaminan mutu (LPM/UPM), dosen, mahasiswa, dan pihak eksternal. Wawancara ini menggunakan format semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas bagi informan untuk mengungkapkan pengalaman dan pandangan mereka terkait sistem penjaminan mutu yang diterapkan.
3. Studi Dokumentasi: Studi dokumentasi dilakukan dengan

mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan, seperti kebijakan penjaminan mutu, laporan evaluasi diri (LED), borang akreditasi, dan laporan tracer study. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran jelas tentang kebijakan yang diterapkan, hasil evaluasi, serta perencanaan dan tindak lanjut penjaminan mutu yang telah dilakukan.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pedoman observasi, panduan wawancara, dan format studi dokumentasi. Instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan gambaran yang lengkap tentang sistem penjaminan mutu di Universitas Pertahanan RI. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi sistem penjaminan mutu.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dianalisis dengan pendekatan tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu penyaringan dan pengorganisasian data yang relevan, diikuti dengan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau grafik untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola yang muncul dalam data dan memverifikasi apakah hasil analisis tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD IT Alam Garut, dengan fokus pada proses internalisasi nilai-nilai *mardhatillah* dalam pembentukan karakter siswa. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa proses internalisasi nilai tersebut berlangsung secara bertahap dan sistematis melalui berbagai aktivitas sekolah yang dirancang secara sadar untuk membentuk karakter islami.

Internalisasi melalui Keteladanan Guru

Salah satu temuan utama menunjukkan bahwa guru memainkan peran sentral sebagai model dalam internalisasi nilai-nilai *mardhatillah*. Dalam keseharian di sekolah, guru menunjukkan sikap sopan, sabar, jujur, dan bertanggung jawab yang secara langsung diamati dan ditiru oleh siswa. Keteladanan tersebut tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga dalam berbagai aktivitas luar kelas seperti saat guru membimbing salat berjamaah, menyapa siswa di pagi hari, dan menegur dengan lembut saat siswa melakukan kesalahan. Para siswa terlihat terbiasa mengikuti cara guru dalam berinteraksi—berbicara dengan sopan, meminta izin, dan menunjukkan empati terhadap teman yang kesulitan. Seorang siswa kelas 5 bahkan menyatakan bahwa ia ingin menjadi guru karena guru-gurunya “baik dan sabar, tidak marah-marah kalau kita salah”.

Pembiasaan Melalui Aktivitas Harian

Temuan lainnya menunjukkan bahwa internalisasi nilai juga dilakukan melalui kegiatan rutin atau pembiasaan. Setiap pagi, siswa

melaksanakan salat Dhuha secara berjamaah, dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'an di kelas. Kegiatan ini dilakukan secara konsisten dan menjadi bagian dari budaya sekolah. Selain itu, terdapat kegiatan rutin lainnya seperti sedekah Jumat, murojaah hafalan, serta kegiatan "adab corner" di setiap kelas, di mana siswa diberi contoh konkret tentang akhlak terpuji. Dari hasil observasi, tampak bahwa siswa mulai menunjukkan kebiasaan positif seperti mengucapkan salam saat bertemu, merapikan alas kaki, dan menolong teman tanpa diminta. Kebiasaan ini terbentuk karena dilakukan berulang-ulang dan didampingi oleh guru dengan pendekatan yang persuasif.

Pengintegrasian Nilai dalam Pembelajaran

Nilai-nilai *mardhatillah* juga diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran tematik. Guru secara sadar menyisipkan pesan-pesan moral dan nilai spiritual ke dalam materi pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran IPA tentang lingkungan, guru mengaitkan pentingnya menjaga alam dengan amanah sebagai khalifah di bumi. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, siswa diberi tugas membuat cerita pendek bertema

kejujuran dan tanggung jawab. Dokumentasi RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) menunjukkan adanya muatan karakter dan spiritual dalam indikator dan tujuan pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan guru, integrasi ini dilakukan untuk membentuk pemahaman bahwa semua ilmu dan aktivitas adalah bagian dari ibadah.

Peran Lingkungan Sekolah

Lingkungan fisik dan sosial sekolah turut mendukung proses internalisasi nilai-nilai *mardhatillah*. Sekolah memiliki desain terbuka yang terintegrasi dengan alam, menciptakan suasana tenang dan spiritual. Papan-papan motivasi bernuansa Islami terpasang di berbagai sudut sekolah dengan pesan seperti "Berbuat baik itu mudah", "Allah melihat amalmu", atau "Jujur itu berkah". Selain itu, sekolah menyediakan pojok ibadah, majelis taklim guru, dan forum evaluasi karakter siswa. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa sekolah memiliki agenda tahunan seperti *camp tahfidz*, *kegiatan outbond berbasis nilai*, dan *aksi peduli lingkungan*, yang kesemuanya dirancang untuk menumbuhkan kepekaan spiritual dan sosial siswa.

Hambatan dalam Internalisasi Nilai

Meskipun sekolah telah berupaya secara maksimal, beberapa hambatan tetap ditemukan. Salah satunya adalah ketidakkonsistenan perilaku siswa di luar lingkungan sekolah. Berdasarkan wawancara dengan guru dan wali kelas, beberapa siswa mengalami kesulitan mempertahankan sikap disiplin dan jujur saat di rumah atau di lingkungan bermain. Faktor latar belakang keluarga sangat memengaruhi hal ini. Beberapa orang tua tidak sepenuhnya memahami atau melanjutkan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah. Guru menyebut perlunya sinergi antara sekolah dan orang tua agar proses internalisasi nilai berjalan seimbang. Hambatan lainnya adalah perbedaan tingkat pemahaman siswa terkait makna dari nilai yang diajarkan. Beberapa siswa mampu memahami dan mengamalkan nilai dengan sadar, sementara yang lain hanya mengikuti karena terbiasa, belum sampai pada tingkat kesadaran penuh.

Peran Kepala Sekolah dan Kebijakan Lembaga

Kepala sekolah berperan aktif dalam mengarahkan visi dan budaya sekolah. Dalam wawancara, kepala sekolah menyatakan bahwa nilai

mardhatillah bukan hanya slogan, tetapi harus tercermin dalam semua aspek sekolah, termasuk manajemen, kebijakan, dan rekrutmen guru. Setiap kegiatan disaring berdasarkan nilai edukatif dan spiritual. Guru dan tenaga kependidikan juga mengikuti pelatihan rutin yang bertujuan memperkuat visi spiritual lembaga. Kepala sekolah menyatakan bahwa semua kebijakan dan program sekolah harus menjawab satu pertanyaan kunci: *“Apakah ini mendekatkan kita dan siswa kepada rida Allah?”*

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, proses internalisasi nilai-nilai *mardhatillah* di SD IT Alam Garut menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis nilai ketuhanan dapat diimplementasikan secara konkret melalui pendekatan keteladanan, pembiasaan, integrasi kurikulum, dan penciptaan budaya sekolah. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendidikan karakter yang efektif dalam konteks Islam harus menyentuh dimensi spiritual, afektif, dan perilaku secara menyeluruh.

Proses keteladanan yang dilakukan guru dalam interaksi harian dengan siswa sejalan dengan prinsip pendidikan moral menurut Al-Ghazali, yang menekankan bahwa akhlak tidak cukup diajarkan secara teoritik, tetapi harus ditransmisikan melalui contoh nyata dan konsistensi perilaku (Sutisna, 2020). Keteladanan ini menjadi fondasi utama dalam membentuk kesadaran moral siswa, karena anak-anak usia sekolah dasar masih berada pada tahap perkembangan imitasi dan internalisasi perilaku dari lingkungan terdekat mereka, terutama guru sebagai figur otoritatif di sekolah.

Kegiatan pembiasaan seperti salat Dhuha, tadarus, sedekah, dan adab harian yang dilakukan secara rutin, memperkuat dimensi afektif dalam pendidikan karakter. Ini selaras dengan teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg (1976), yang menyatakan bahwa nilai moral dapat tertanam melalui pengalaman berulang yang membawa individu pada refleksi dan konsistensi sikap. Ketika siswa dilibatkan dalam kebiasaan positif yang diulang setiap hari, maka nilai tersebut akan tertanam secara bertahap dan menjadi bagian dari karakter mereka.

Dalam konteks ini, nilai *mardhatillah* sebagai orientasi hidup tidak lagi menjadi konsep abstrak, tetapi hadir dalam bentuk perilaku sehari-hari.

Pengintegrasian nilai dalam pembelajaran menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak dilakukan secara terpisah dari kegiatan akademik, tetapi menjadi satu kesatuan dengan proses belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan pendekatan pendidikan karakter menurut Lickona (1991), yang menekankan bahwa nilai-nilai moral harus diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan aktivitas sekolah, bukan hanya dibebankan pada pelajaran agama. Di SD IT Alam Garut, nilai-nilai seperti tanggung jawab, amanah, dan cinta lingkungan ditanamkan melalui pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual. Integrasi ini menunjukkan bahwa nilai *mardhatillah* bukan hanya slogan, tetapi menjadi ruh dari proses pembelajaran.

Lingkungan fisik dan sosial sekolah yang mendukung, seperti tampilan visual dengan pesan-pesan Islami, pojok adab, serta kegiatan yang melibatkan alam, juga menjadi faktor penting dalam membentuk suasana spiritual yang kondusif. Hal

ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga melalui pembentukan atmosfer atau iklim sekolah yang mencerminkan nilai-nilai yang diharapkan (Hasanah, 2022). Budaya sekolah yang konsisten mendorong siswa untuk terus berlatih dan mengalami nilai secara nyata, bukan sekadar mendengar atau membaca.

Meski demikian, hambatan yang ditemukan, seperti tidak konsistennya perilaku siswa di luar sekolah dan kurangnya dukungan keluarga, menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Pendidikan karakter berbasis nilai *mardhatillah* membutuhkan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Temuan ini menguatkan gagasan Lickona (1991) yang menyebut bahwa pembentukan karakter memerlukan lingkungan yang saling mendukung agar nilai yang ditanamkan di sekolah dapat terus hidup dalam kehidupan siswa sehari-hari. Ketidakhadiran peran orang tua dalam mendampingi siswa di rumah dapat menghambat kesinambungan proses internalisasi nilai yang telah dilakukan di sekolah.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam membangun visi spiritual sekolah juga terbukti berpengaruh kuat dalam mengarahkan budaya organisasi pendidikan. Ketegasan kepala sekolah dalam memastikan bahwa seluruh program, guru, dan kebijakan selaras dengan nilai *mardhatillah* menunjukkan bahwa keberhasilan internalisasi nilai tidak hanya bersumber dari guru di kelas, tetapi juga dari komitmen struktural lembaga. Hal ini konsisten dengan penelitian Mulyadi (2020) yang menegaskan pentingnya kepemimpinan berbasis nilai dalam membangun sistem pendidikan karakter yang efektif di lembaga Islam.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai *mardhatillah* dalam pembentukan karakter siswa tidak hanya merupakan aktivitas pedagogik, tetapi juga merupakan proses kultural, spiritual, dan manajerial yang harus terencana, konsisten, dan menyeluruh. SD IT Alam Garut telah menunjukkan praktik baik dalam hal ini, meskipun perlu penguatan dari aspek eksternal seperti keterlibatan keluarga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Pertahanan RI, dapat disimpulkan beberapa hal yang relevan dengan pengelolaan sistem penjaminan mutu di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya di bidang pertahanan. Meskipun terdapat komitmen yang kuat dari pimpinan universitas dalam implementasi SPMI, masih terdapat tantangan yang harus diatasi agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan.

1. Perencanaan SPMI:

Perencanaan SPMI di Universitas Pertahanan RI dilakukan secara terstruktur dan strategis dengan melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari pimpinan universitas, fakultas, program studi, hingga mahasiswa. Perencanaan ini berfokus pada kualitas pendidikan yang diharapkan dapat memenuhi standar nasional dan internasional, serta relevan dengan kebutuhan sektor pertahanan.

Proses perencanaan SPMI di universitas ini mencakup integrasi kebijakan pendidikan dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan penggunaan teknologi pendidikan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pendekatan berbasis kebutuhan yang lebih mendalam, serta keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada level fakultas dan program studi.

2. Pelaksanaan SPMI:

Dalam pelaksanaan SPMI, Universitas Pertahanan RI telah mengintegrasikan kebijakan penjaminan mutu ke dalam berbagai aspek pendidikan, termasuk kurikulum, pengajaran, dan penilaian pembelajaran. Meskipun demikian, kendala yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan penerapan standar mutu di semua fakultas, keterbatasan dalam penggunaan teknologi pendidikan, serta kurangnya fasilitas yang mendukung pembelajaran berbasis

simulasi. Selain itu, meskipun universitas berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dosen melalui pelatihan, beberapa tantangan dalam pengajaran, seperti perbedaan latar belakang mahasiswa, masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas pengajaran yang merata di seluruh program studi.

3. Evaluasi SPMI:

Evaluasi SPMI di Universitas Pertahanan RI dilaksanakan secara rutin dan bertujuan untuk menilai pencapaian kualitas pendidikan di setiap program studi dan unit pendidikan. Meskipun evaluasi dilakukan secara sistematis, hasilnya sering kali bersifat umum dan kurang mendalam, terutama dalam mengidentifikasi langkah konkret untuk perbaikan. Selain itu, evaluasi lebih sering terfokus pada aspek administratif, seperti kelengkapan dokumen dan laporan, dibandingkan dengan aspek pengelolaan pembelajaran atau pengembangan kurikulum.

Keterlibatan stakeholder, terutama dosen dan mahasiswa, dalam proses evaluasi dan tindak lanjut juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa umpan balik yang diberikan benar-benar diterima dan diimplementasikan secara efektif.

4. Tindak Lanjut SPMI:

Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi di Universitas Pertahanan RI dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan SPMI. Proses tindak lanjut ini mencakup perbaikan administratif, seperti pembaruan laporan dan pemenuhan dokumen, serta pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas dosen. Namun, keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun SDM, sering kali menghambat implementasi perbaikan yang lebih substansial. Selain itu, meskipun ada upaya untuk melibatkan stakeholder dalam tindak lanjut, keterlibatan

dosen dan mahasiswa dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan masih terbatas. Evaluasi tindak lanjut yang berkelanjutan juga belum dilakukan secara sistematis, sehingga sulit untuk menilai efektivitas langkah-langkah perbaikan yang telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albright, D., & Jorfi, S. (2020). *International Standards in Higher Education: A Focus on Defense and Security Education*. *Journal of Higher Education*, 25(3), 210-225.
- Bass, B. M. (1990). *From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision*. *Organizational Dynamics*, 18(3), 19-31.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
- Gagne, R. M. (2014). *Principles of Instructional Design* (5th ed.). Cengage Learning.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Ross-Gordon, J. M. (2010). *Supervision and Instructional Leadership: A Developmental Approach* (9th ed.). Pearson.
- Hallinger, P., & Heck, R. H. (1998). *Exploring the principals' contribution to school effectiveness: 1980–1995*. *School Effectiveness and School Improvement*, 9(2), 157-191.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2004). *A review of the impact of leadership on student outcomes: Final report*. London: Department for Education and Skills.
- Marginson, S. (2016). *Higher Education and the Common Good*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work*:

- Models for Superior Performance.* Wiley.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization.* Doubleday.
- Tinto, V. (2017). *Completion and Graduation in Postsecondary Education: Pathways, Contexts, and Cultures.* Routledge.
- Wiles, J., & Bondi, J. (2007). *Curriculum Development: A Guide to Practice* (7th ed.). Pearson.
- Wright, D. (2016). *Integrating Technology into Education: The Role of E-Learning in Modern Pedagogy.* *Journal of Educational Technology*, 31(2), 15-28.